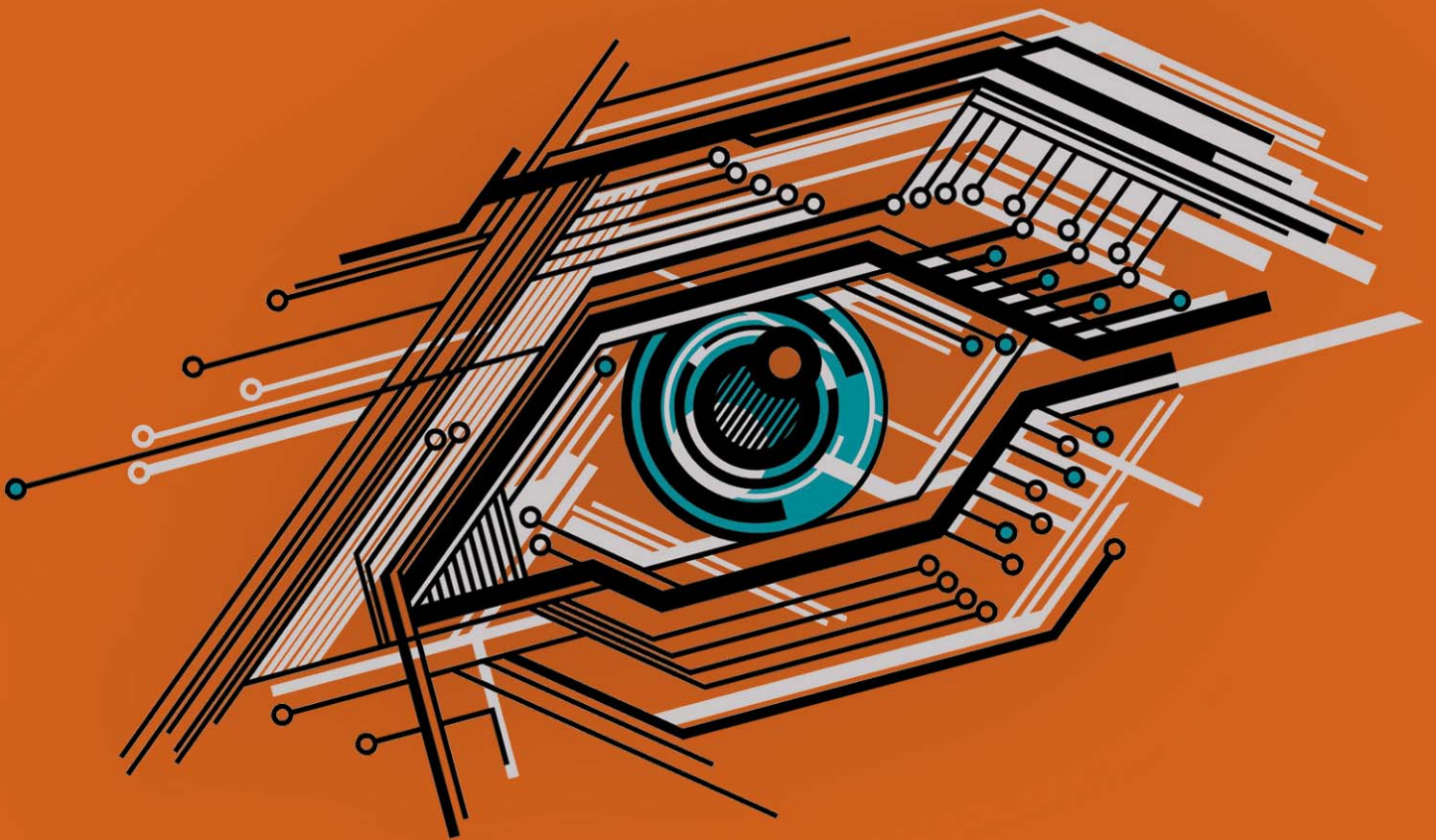


Buletin

Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



SPTT-SPA PLATFORM TRANSPARANSI & PENGAWASAN

**MENJEGAL PRAKTIK
PENCUCIAN UANG**

**JAMKRINDO
GARAP BISNIS RESI
GUDANG CMA**

**BACHRUL OPTIMIS
TRANSAKSI PBK
2018 NAIK 10%**

EDISI 191

BAPPEBTI/MJL/191/XVI/2017/EDISI OKTOBER

INDONESIA HEBAT TANPA PENCUCIAN UANG



▶ Kesenjangan Ekonomi, Sulitnya Mencari Pekerjaan, Bisnis yang rentan, Tingginya Angka Kejahatan bagian Masalah Bangsa yang Harus Diatasi



▶ Korupsi, Penggelapan Pajak, Penyalahgunaan Narkotika, Terorisme, Pencucian Uang, dan Kejahatan Ekonomi Lainnya Menghasilkan Dampak Buruk Bagi Negara Kita



▶ Pelaku Kejahatan Tidak Berhenti pada saat Kejahatan dilakukan dan Hasil Kejahatan Berhasil Diperoleh. Pelaku Kejahatan Biasanya Juga Menyembunyikan atau menyamarkan uang / harta hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah. Perbuatan tersebut adalah **PENCUCIAN UANG**



▶ Pelaku Pencucian Uang berniat untuk **menghindari penyelidikan aparat hukum**, meningkatkan keuntungan dan menikmati harta kekayaan hasil kejahatan dengan aman



▶ Dalam melakukan aksinya, pelaku pencucian uang akan menempatkan hasil kejahatan kedalam berbagai transaksi keuangan, memindahkan dan memperpanjang rangkaian transaksi dan pada akhirnya, setelah dirasa aman, pelaku akan mengambil kembali uang/harta itu untuk dinikmati.

PENCUCIAN UANG BERDAMPAK PADA:



Meningkatnya angka kriminalitas



Sektor swasta yang sah sulit berkembang



Integritas sistem keuangan terganggu



Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi

KALAU BERSIH KENAPA HARUS RISIH

BERITA UTAMA

04

SPTT-SPA
Platform
Transparansi &
Pengawasan



BERJANGKA

08

Menjegal Praktik Pencucian Uang

RESI GUDANG

10

Jamkrindo Garap Bisnis Resi Gudang CMA

INTERVIEW

12

Sikat 'Investasi Bodong'

DARI LAPANGAN

21

SRG Redam
Jerit Petani
Lada



AGENDA FOTO

14

- Kunjungan Kerja Bappebti ke Budapest, Hungaria
- Peresmian dan Penandatanganan MoU FTLC di Universitas Sriwijaya
- Literasi SRG Rumpuk Laut di Kabupaten Takalar
- Pelatihan Wartawan Industri PBK

AKTUALITA

16

- BC Optimis Transaksi PBK 2018 Naik 10%
- BBJ 'Masuk Radar' Pelaku Usaha Asing

KIPRAH

24

Noer Juwantiningsih,
Kepala Kancab Surabaya
PT Kresna Investa Futures

Tekun dan
Percaya Diri



ENGLISH CORNER

18

- Draft of Presidential Regulation of Commodity Auction Market Has Entered the Final Stage
- ICDX Target Launches Tin Futures Contract Beginning 2018

KOLOM

22

Mengelola Risiko Harga Melalui Lindung Nilai

Buletin
Bappebti
Mengabdikan Dengan Integritas

Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
www.bappebti.go.id

Penanggung Jawab
Bachrul Chairi

Redaktur
Nusa Eka

Penyunting / Editor
Subagiyo
Annisa F Wulandari
Apriliyanto

Fotografer
Gita Regina, Leli Wulandari

Sekretaris
Katimin

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172,
Jakarta Pusat

*Redaksi menerima artikel ataupun
opini dikirim lengkap dengan
identitas serta foto ke E-mail:
humas.bappebti@kemendag.go.id*

f Bappebti Kementerian Perdagangan
tw @InfoBappebti
ig @Bappebti

SPTT-SPA Platform Transparansi & Pengawasan

Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA), akhirnya diluncurkan Bappebti untuk transparansi dan memperkuat pengawasan pada transaksi SPA.

Harus diakui, transaksi Sistem Perdagangan Alternatif- SPA merupakan sistem perdagangan yang mendominasi transaksi kontrak berjangka di Indonesia. Dari data Bappebti, tercatat transaksi SPA yang masuk kategori perdagangan bilateral, ini, di tahun 2016 mencapai 79,37% dari total transaksi yang terjadi di dua bursa berjangka Indonesia. Sedangkan di tahun 2015 bahkan mencapai 80,57%.

Hal serupa juga sepertinya masih akan terjadi pada tahun 2017, ini. Untuk periode Januari-Oktober 2017, total transaksi pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi- PBK sudah mencapai 5.735.804 lot. Dari total volume transaksi itu, perdagangan bilateral mencapai 81,23% atau sebanyak 4.659.301 lot, selebihnya 18,77% merupakan transaksi multilateral yang hanya 1.076.503 lot.

Sejatinya amanat UU No. 10 Tahun 2011, tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, menekankan pelaku PBK di Indonesia untuk kontrak multilateral baik sebagai sarana pembentukan dan acuan harga maupun mekanisme lindung nilai- *hedging* dari subjek kontrak berjangka komoditi. Namun faktanya amanat itu masih jauh dari harapan, transaksi SPA masih jadi



idola bagi pelaku pasar dengan berbagai alasannya.

Sebab itu, Bappebti selaku otoritas pembina dan pengawas pasar perdagangan berjangka tak henti-hentinya menelorkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan likuiditas perdagangan berjangka multilateral dan di sisi lain menciptakan transparansi pada perdagangan bilateral.

Sekedar informasi, istilah SPA artinya sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Dari

pengertian itu, SPA dikenal dengan sebutan bilateral atau transaksi yang terjadi dari dua pihak. Sedangkan produknya sangat beragam, misalnya valuta asing, emas, indeks emas, indeks saham asing dan lainnya.

Sementara itu, istilah multilateral adalah suatu mekanisme transaksi [jual/beli] yang dilakukan di dalam bursa antara banyak pihak [banyak penjual dan banyak pembeli], di mana antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Transaksi ini dapat dilihat di Bursa Berjangka dan berjalan transparan serta didukung oleh Lembaga Kliring Berjangka. Transaksi multilateral juga dikenal dengan kontrak komoditi primer. Hal itu lantaran

produk multilateral terdiri dari beragam komoditi seperti kopi, kakao, *crude palm oil*- CPO, minyak goreng- olein, emas dan lainnya.

Tapi harus diakui, mekanisme perdagangan bilateral yang diregulasi pada tahun 2005, lalu, menjadi suplemen ampuh bagi kalangan pelaku usaha perdagangan berjangka dan sekaligus dapat menyelamatkan wajah industri dari ancaman kebangkrutan. Sebab, dalam usia ini sekitar lima tahun perdagangan berjangka komoditi yang diawal pada akhir tahun 2000 dengan mekanisme multilateral, tak membidas likuiditas bursa dan para anggotanya. Hal itu lantaran menjual produk multilateral bukanlah perkara mudah. Butuh proses panjang agar transaksinya likuid.

Meski begitu, adanya produk SPA juga kerap mencoreng citra industri PBK lantaran lemahnya perlindungan dan rendahnya pengetahuan para nasabah atau investor. Karena itu, transaksi SPA masuk dalam kategori penuh regulasi. Beberapa tahun lalu, Bappebti sebenarnya telah menerapkan Sistem Pengawasan Tunggal- SPT untuk mengawasi transaksi SPA. Tapi itu pun belum dianggap cukup, maka Bappebti kembali menyempurnakan sistem pengawasannya. Dan pada Selasa, 31 Oktober 2017, lalu, di Jakarta, Kepala Bappebti Bachrul Chairi meluncurkan Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, Pantas Lumban Batu, Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Hariyati, Dirut Bursa Berjangka Jakarta- BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, Plt Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi, Dirut PT Clearing House Indonesia, Nursalam, Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo, F. Wishnubroto serta sejumlah pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi.

Transparansi

Dalam sambutannya, Bachrul Chairi, berucap, SPTT-SPA itu sedianya akan resmi diluncurkan oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. "Kami berharap SPTT-SPA ini resmi diluncurkan Menteri Perdagangan sekitar pertengahan Januari 2018, jadi saat ini kita luncurkan untuk buktikan kepada masyarakat bahwa transaksi SPA telah penuh diawasi melalui mekanisme yang transparan," katanya.

Menurut Bachrul, pembangunan SPTT-SPA dilatarbelakangi pesatnya perkembangan industri berjangka di Indonesia, khususnya SPA yang memiliki risiko tinggi serta kompleksitas transaksi di dalamnya. "SPTT-SPA merupakan sistem pengawasan yang dibangun Bappebti untuk melakukan pengawasan secara *online* terhadap transaksi SPA. Sistem ini dapat terkoneksi dengan sistem perdagangan yang digunakan pedagang penyelenggara SPA. Sehingga, semua transaksi nasabah dapat diawasi pelaporannya ke bursa berjangka dan pendaftarannya ke lembaga kliring," jelas Bachrul.

"Dengan adanya SPTT-SPA, Bappebti dapat melakukan pengawasan transaksi SPA dengan lebih cepat, akurat, dan

tepat waktu terhadap pelaku usaha PBK sehingga dapat mencegah terjadinya *market fraud* dan *financial fraud*. Hal ini sangat penting mengingat transaksi perdagangan komoditi di Indonesia masih didominasi transaksi SPA," papar Bachrul.

Dia menambahkan, dalam transaksi SPA, semua basis data (*database*) yang tersimpan di dalam masing-masing *server* pedagang penyelenggara SPA bisa ditarik oleh SPTT-SPA secara periodik setiap hari. Basis data tersebut akan diolah Bappebti untuk laporan sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan.

Menurut Bachrul Chairi, pada tahap awal implementasi Sistem Pengawasan Tunggal hanya bisa digunakan untuk mengawasi transaksi yang sudah terjadi- *post trade*. Hal ini mengingat masing-masing pedagang penyelenggara memiliki sistem perdagangan berbeda untuk mengeksekusi transaksi, menyampaikan informasi kepada nasabah, serta melakukan pelaporan kepada bursa berjangka dan Bappebti.

"Dari kajian dan penelusuran tim di Bappebti, terdapat empat platform yang digunakan para pedagang SPA, yaitu Meta Trade- MT4, Trade Pro, PRO-I dan I-Exchange. Dan keempat platform itu





sudah terkoneksi dengan SPTT-SPA yang dibangun Bappebti,” terang Bachrul Chairi kepada media.

Dalam penjelasan Bachrul, dari sebanyak empat platform itu terungkap sistem perdagangan MT4 digunakan sebanyak 49 perusahaan pialang berjangka pada 13 klaster pedagang SPA atau mencapai 81% dari jumlah pelaku pasar. Untuk Trade Pro, digunakan sebanyak 5 pialang berjangka dari 1 klaster pedagang SPA atau mencapai 9%. Sedangkan yang menggunakan platform PRO-I, ada digunakan 4 pialang berjangka pada 1 klaster pedagang SPA atau mencapai 7%. Selanjutnya, sistem perdagangan I-Exchange digunakan 1 pialang berjangka pada 1 klaster pedagang SPA atau sebanyak 3%.

“Jadi sampai saat ini Bappebti telah memetakan hanya ada 4 platform yang digunakan untuk perdagangan SPA. Maka jika ada dari pelaku pasar- pedagang SPA yang kemudian hari menggunakan platform lain, wajib melapor ke Bappebti agar dapat dikoneksikan ke SPTT-SPA. Namun jika tidak dilaporkan, tentu ada konsekuensinya yakni sanksi bertahap dari Bappebti,” tegas Bachrul Chairi.

Manfaat SPTT-SPA

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, Pantas

Lumban Batu, mengatakan, dilansirnya SPTT-SPA memiliki banyak manfaat baik bagi para pelaku usaha maupun masyarakat. Diantaranya, memberikan kemudahan akses data secara tepat waktu sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kerja, karena ditunjang ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan terkini. SPTT-SPA juga mampu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, karena dapat meminimalisasi penggunaan sumber daya dalam memproses serta menyimpan data dan informasi.

“Dalam jangka panjang, sistem ini dapat menekan biaya input data serta biaya penyimpanan dokumen yang menyertai proses pelaporan dan pengawasan transaksi,” terang Pantas.

Selain itu, tambahnya, SPTT-SPA dapat meningkatkan kualitas data dengan prosedur yang jelas dan terstruktur [standar], serta terimplementasinya proses kerja yang efektif, efisien, dan terukur pencapaiannya. Basis data pengawasan pada SPTT-SPA juga dapat menjadi data dukung dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan pimpinan di Bappebti.

Selain karena kecepatan, sistem ini mampu menekan kesalahan, meningkatkan kontrol data, menyediakan akses pemutakhiran,

serta mampu memilah jenis informasi apa saja yang dibutuhkan Bappebti saat melakukan pengawasan. Selanjutnya, SPTT-SPA akan menciptakan proses yang transparan, karena tersedianya fitur yang memudahkan Bappebti untuk melakukan pengawasan transaksi SPA.

“Dengan adanya SPTT-SPA diharapkan pengawasan transaksi SPA dapat lebih optimal, sehingga dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan tepat waktu serta dapat membantu Bappebti dalam memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan proses pengawasan transaksi terhadap pelaku usaha PBK,” papar Pantas Lumban Batu.

Dia juga berharap, ke depannya industri PBK di Indonesia memiliki integritas, dan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi perkembangan perekonomian negara.

Sementara itu, menurut Dirut BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, kepada media mengatakan, SPTT-SPA merupakan terobosan dan langkah maju dari industri PBK yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa bursa berjangka memiliki platform pengawasan transaksi di bidang perdagangan SPA.

“Kami sangat berharap dengan SPTT-SPA ini akan meningkatkan nilai tambah industri dan likuiditas bursa berjangka untuk transaksi bilateral. Jadi kita juga harapkan masyarakat yang selama ini bertransaksi melalui penawaran investasi online dapat bergeser ke bursa berjangka. Sebab, transaksi bilateral di bursa berjangka dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” ujar Paulus.

Senada dengan itu, Dirut PT Clearing House Indonesia, Nursalam, mengatakan, SPTT-SPA merupakan kebijakan yang era kekinian. “Dengan platform SPTT-SPA, investor akan lebih nyaman karena data transaksinya mendapat pengawasan dari Bappebti, sehingga semua pihak harus transparan dan fair,” terang Nursalam. 📌

SPTT-SPA Cegah Market Fraud & Financial Fraud

Bappebti meresmikan Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif [SPTT-SPA]. Peresmian itu dikemas dalam acara Konsinyering Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha, dan mengambil tema “Implementasi SPTT-SPA”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, dan mengambil tempat di Hotel Orchardz, Jakarta, pada Selasa, 31 Oktober 2017 lalu.

“Konsinyering ini diadakan untuk membahas mengenai Implementasi SPTT-SPA yang telah dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik,” terang Pantas Lumban Batu, Kepala Biro Pengawasan dan Pasar Berjangka dan Fisik.

Investasi dalam produk SPA memang sangat menggiurkan. Tapi perlu diingat, prinsip investasi di industri perdagangan berjangka yaitu ‘high risk high return’. “Artinya, besarnya potensi kerugian akan sebanding dengan besarnya potensi keuntungan. Jadi semakin besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh, maka semakin besar pula potensi kerugian yang dapat timbul. Pun begitu sebaliknya,” ujar Pantas.

Dalam beberapa tahun terakhir, tak bisa dipungkiri transaksi kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral atau yang dikenal dengan SPA sangat mendominasi. Disamping itu cakupan komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan juga telah berkembang semakin luas. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor diamandemennya UU No. 32/97 tentang PBK menjadi UU No. 10/2011 tentang Perubahan UU No. 32/97 tentang PBK.



Dengan semakin berkembangnya transaksi SPA maka dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dalam bertransaksi. Karena itu, Bappebti meluncurkan Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif [SPTT-SPA], Oktober 2107 lalu.

Sebenarnya, Jauh sebelum itu sistem pengawasan tunggal untuk transaksi SPA telah dirintis Bappebti sejak akhir 2010 lalu. Hal itu terlihat dari Peraturan Kepala Bappebti Nomor 79/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang Sistem Pengawasan Tunggal [Supervisory System] dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi SPA. Selanjutnya, Bappebti juga mengeluarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 Tentang Sistem Pengawasan Tunggal [Supervisory

System] dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi SPA. Dan untuk saat ini, aplikasi pengawasan transaksi SPA itu telah semakin sempurna, dan diyakini mampu mencegah terjadinya *market fraud* dan *financial fraud*.

“Sebagai regulator di industri PBK, Bappebti memang tidak main-main untuk memperketat transaksi SPA. Dengan SPTT-SPA, Bappebti dapat melakukan pengawasan secara *online* terhadap transaksi SPA. Selain itu, merujuk Peraturan Kepala Bapebti Nomor 5 tahun 2017 tentang SPA, Bappebti menunjuk bursa berjangka sebagai tempat pelaporan transaksi SPA. Dan penyelenggara SPA-pedagang berjangka- wajib melaporkan secara elektronik setiap transaksi SPA-nya ke bursa berjangka dalam rangka pengawasan pasar,” imbuh Pantas Lumban Batu. 📌



Menjegal Praktik Pencucian Uang

Sejumlah peraturan diterbitkan Bappebti untuk mencegah tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme di industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air.

Sejak November 2008, lalu, Bappebti telah berkomitmen mencegah tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme di industri perdagangan berjangka komoditi. Langkah Bappebti yakni menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan- PPATK dengan menandatangani nota kesepahaman- MoU tentang kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang- TPPU di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Tindaklanjut MoU tersebut, pada Mei 2017 lalu, Kepala Bappebti Bachrul

Chairi dan Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, kembali menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertukaran informasi pelanggaran kewajiban pelaporan, dan koordinasi pengenaan sanksi administratif. Perjanjian kerjasama itu adalah bagian persiapan dalam menghadapi Mutual Evaluation Review- MER tahun 2017, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari rezim anti-pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme yang tergabung dalam Komite TPPU-Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.

"Bappebti saat ini telah menyelesaikan dua dokumen kegiatan sesuai rencana aksi yang diusulkan PPATK, yakni 'Peraturan Kepala Bappebti tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta' dan dokumen 'Penilaian Risiko TPPU/TPPT pada Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017'," ucap Bachrul Chairi.

Dua dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan yang akan disampaikan Bappebti dalam MER pada November 2017. Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia yang menjadi salah satu anggota *Asia-Pacific Group on Money Laundering- APG*. Nantinya, MER akan menilai kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang- APU dan Pencegahan Pendanaan Terorisme- PPT di Indonesia dalam melaksanakan rekomendasi *Financial Action Task Force- FATF*. Sebagai gambaran, FATF adalah program berstandar global dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan terorisme.

Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya 19 Oktober 2017, lalu, Bappebti

merealisasikan komitmennya dengan menerbitkan sejumlah peraturan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sejumlah aturan itu diantaranya; pertama, Peraturan Kepala Bappebti No. 8 Tahun 2017, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka.

Kedua, Perka Bappebti No. 9 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka. Ketiga, Perka Bappebti No. 10 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Untuk melengkapi Perka terdahulu, Kepala Bappebti juga mengeluarkan Perka Bappebti No. 11 Tahun 2017, tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka.

Pialang Peka

Bappebti merupakan lembaga pengawas dan pengatur di industri PBK. Dan salah satu pelaku usaha di industri ini, terdapat pialang berjangka yang sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam aktifitasnya, pialang berjangka sangat mungkin menjadi pintu masuk harta kekayaan hasil dari tindak pidana maupun pendanaan kegiatan terorisme. Satu contoh, untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta

kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

Karena itu, merujuk Perka Bappebti No. 8 Tahun 2017, pialang berjangka harus mengetahui secara detail informasi para nasabahnya. Pasal 16 Perka ini menyebutkan, pialang berjangka wajib melakukan prosedur Uji Tuntas Nasabah atau Customer Due Diligence- CDD. Maksudnya, CDD dalam Perka ini adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pialang berjangka untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/ atau pola transaksi calon nasabah atau nasabah.

Ada empat kondisi dimana prosedur CDD harus dilakukan oleh pialang berjangka. Pertama, pada saat proses penerimaan calon nasabah menjadi nasabah pialang berjangka. Kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan seratus juta rupiah.

Ketiga, terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat- *Beneficial Owner*. Terakhir, terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Sedangkan dalam Perka Bappebti No. 11 Tahun 2017, Bappebti memberikan pedoman tentang penerapan program APU- anti pencucian uang dan PPT- pencegahan pendanaan terorisme pada pialang berjangka. Sementara Perka Bappebti No. 9 Tahun 2017, menjelaskan, Bappebti berwenang melakukan pengawasan kepatuhan dan pengawasan khusus terhadap penerapan program APU dan PPT, dan pelaksanaan kewajiban pelaporan pada pialang berjangka.

Adapun maksud pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi penerapan program APU dan PPT; dan/atau pelaksanaan

kewajiban pelaporan. "Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan pengawasan khusus dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan PPATK," jelas Perka tersebut.

Sedangkan, Perka Bappebti Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang masuk ke industri PBK. Nantinya, PPATK akan menyampaikan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah, serta setiap perubahannya ke Bappebti. Selanjutnya, Bappebti akan menyampaikan kepada pialang berjangka. Adapun daftar pendanaan tersebut disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap dana nasabah yang terdapat di rekening terpisah pialang berjangka.

Dan secara tegas Pasal 2 dalam Perka tersebut mengintruksikan, "pialang berjangka wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap dana nasabah yang terdapat di rekening terpisah pialang berjangka, apabila identitas nasabah yang bersangkutan termasuk dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal."

"Intinya dengan aturan baru ini perusahaan pialang berjangka harus peka dan secara dini mengetahui siapa nasabahnya. Jadi, pialang sejak awal berkewajiban mengkategorikan nasabahnya termasuk yang *low risk*, *medium risk* atau *high risk*. Kriteria tentang nasabah itu sudah ada dalam buku pedoman yang dibikin oleh perusahaan pialang," ujar Bachrul.

Ditambahkan Bachrul, selama ini Bappebti sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer- KYC* di tingkat perusahaan pialang berjangka. Namun, sesuai dengan perkembangan global, prinsip KYC itu perlu disesuaikan menjadi berstandar internasional. "Keluarnya berbagai Perka Bappebti itu karena kita mau dan berkomitmen agar industri perdagangan berjangka komoditi terhindar dari praktik illegal apalagi menggunakan uang-uang haram," tandas Bachrul Chairi. 📌

Jamkrindo Garap Bisnis Resi Gudang CMA

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016, tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang- LPPSRG, menetapkan Perum Jamkrindo sebagai LPPSRG setelah melalui tahapan seleksi. Kebijakan itu pula yang menggiring Jamkrindo mengembangkan lini bisnis Resi Gudang berjaminan komoditi, atau lazim dikenal dengan skema collateral management agreement- CMA.



Dengan terbitnya PP No. 1 Tahun 2016, itu, pada Januari 2016, manajemen Jamkrindo langsung berbenah dan membentuk divisi khusus di bidang SRG. Divisi itu pun disebut Divisi Penjaminan Sistem Resi Gudang. “Sebagai divisi yang baru, kami pun mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari persiapan staf, sistem, alur kerja hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan pelaku bisnis resi gudang,” demikian antara lain diucapkan Kadiv SRG, Jamkrindo, Hafizah Ishak, kepada Buletin Bappebti di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurut Hafizah, setelah mempelajari bisnis resi gudang ternyata menyimpan potensi besar dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Apa lagi komoditi yang menjadi subjek dari SRG merupakan komoditi berkarakter fluktuasi harganya cukup tinggi. “Itu artinya, ketika harga cenderung rendah

maka produsen dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang,” terang Hafizah.

Dengan terbitnya UU No. 9 Tahun 2006, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 9 Tahun 2011, tentang Sistem Resi Gudang, maka bukti kepemilikan komoditi yang ditunjukkan dengan Resi Gudang telah berkekuatan hukum sebagai surat berharga.

“Itulah sebabnya, bukti kepemilikan komoditi yang tersimpan di gudang dapat dijaminan atau diagunkan ke lembaga keuangan. Dengan demikian, ketika komoditi harga cenderung rendah si-pemilik Resi Gudang dapat memperoleh pembiayaan bank untuk berbagai kebutuhan produksi selanjutnya. Lalu, ketika harga komoditi tersebut sudah mulai merangkak naik, maka si-pemilik Resi Gudang dapat menjual komoditi dan selanjutnya

melunasi pembiayaan yang diperoleh dari bank,” ucap Hafizah.

Jadi kalau diamati dari alurnya, tambah Hafizah, SRG ini mengajarkan para pelaku komoditi- petani sebagai *entrepreneur* atau pengusaha. “Sebab, dia- petani harus mengelola berbagai informasi terkait harga komoditi untuk dapat dianalisis sehingga ditemukan titik keuntungan yang maksimal ketika komoditi yang tersimpan di gudang dijual,” katanya.

Nah, di mana letak peran Jamkrindo pada alur Resi Gudang tersebut? Dari ketentuan yang ada dikeluarkan otoritas pengawas SRG yakni Bappebti, serta amanat PP No. 1 Tahun 2016, Jamkrindo berperan pada, pertama, memberi perlindungan atau penjaminan kepada pihak Pengelola Gudang. Hal ini dimaksudkan, jika di masa penyimpanan komoditi terjadi kelalaian pihak Pengelola Gudang, maka

Jamkrindo akan memberi pengganti kepada si-pemilik komoditi sebesar 85% dari nilai komoditinya. Hingga saat ini Kementerian Perdagangan telah menetapkan sebanyak 14 komoditi yang dapat dimasukan dalam skema SRG. Masing-masing komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, dan timah.

“Namun, penggantian itu tidak serta merta diberikan oleh Jamkrindo. Tentu ada prosesnya. Karena yang berhak menetapkan penggantian itu adalah Bappebti setelah dilakukan investigasi dan kajian,” papar Hafizah.

Peran kedua dari Jamkrindo adalah, pejaminan kepada lembaga keuangan yang memberi pembiayaan kepada pemilik Resi Gudang, tambah Hafizah.

“Jadi selama ini, seperti kita ketahui mengapa lembaga keuangan kurang berminat memberi kredit atau pembiayaan atas jaminan komoditi, itu dikarenakan tidak adanya lembaga penjaminannya. Sebab itu sering kita dengar alasan dari pihak bank, pemberian pembiayaan kepada sektor pertanian berisiko tinggi, komoditi yang mudah rusak dan lain sebagainya. Pada hal di bisnis komoditi ini nilainya cukup tinggi dan perputarannya pun cukup pendek antara 3 sampai 6 bulan saja, karena harga komoditi pasti akan terus bergerak. Bandingkan dengan pembiayaan kendaraan atau properti, masa pengembaliannya bisa di atas 3 atau bahkan lebih dari 5 tahun,” jelas Hafizah.

Gudang Terdaftar

Untuk dapat memperoleh penjaminan dari Jamkrindo, tentunya pihak Pengelola Gudang haruslah menjadi anggota atau terdaftar sebagai Pengelola Gudang yang disertifikasi oleh Bappebti dan Pusat Registrasi yang diselenggarakan PT Kliring Berjangka Indonesia [Persero]. Hingga saat ini telah terdapat sebanyak 14 gudang di berbagai daerah.

Komoditi Berjaminan

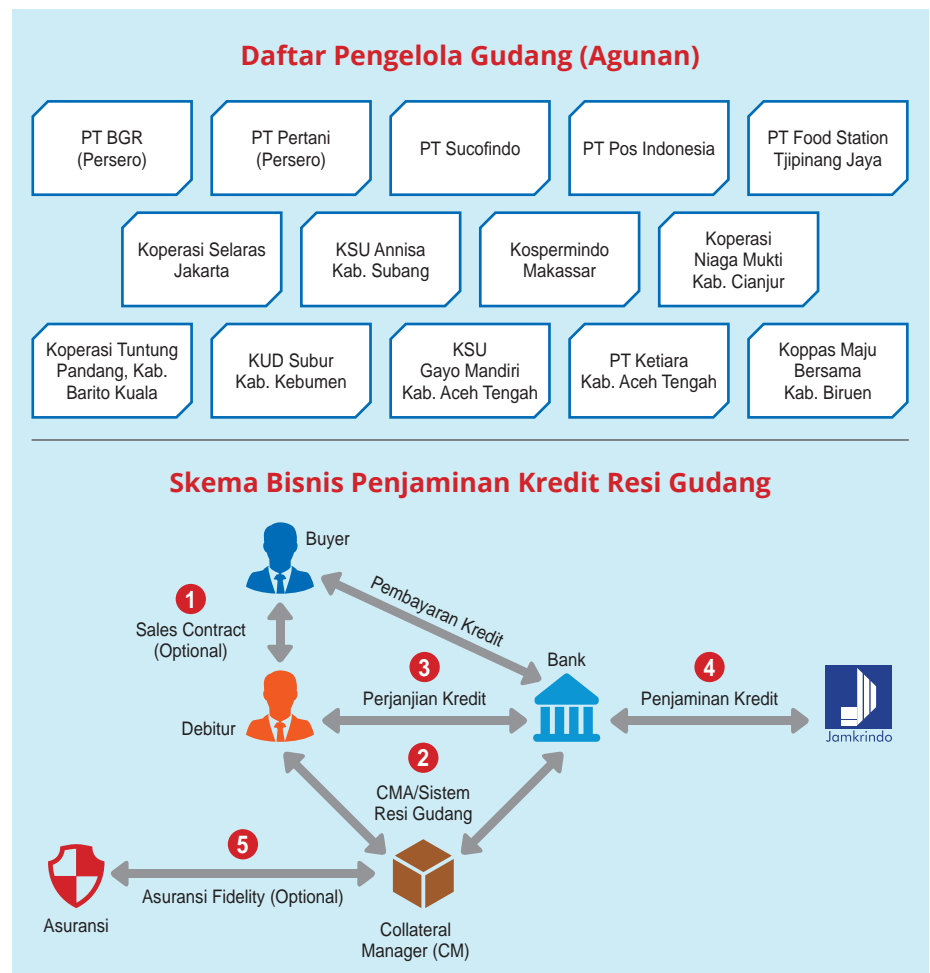
Terbitnya PP No. 1 Tahun 2016, memberi stempel baru bagi Jamkrindo sebagai satu-satunya lembaga penjaminan Resi Gudang di Indonesia. Karena itu pula, Jamkrindo mencoba menggali potensi bisnis penjaminan dengan agunan komoditi dengan skema *collateral management agreement-CMA*. Bisnis penjaminan itu direalisasikan Jamkrindo setelah bermitra dengan sejumlah lembaga perbankan.

“Saat ini kami sudah bekerjasama dengan Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan sejumlah Bank Pembangunan Daerah. Di Provinsi Kalimantan Selatan, kami telah merealisasikan penjaminan pembiayaan dengan BPD Kalsel, nilai sekitar Rp 1 miliar. Sedangkan komoditi

yang dijaminan adalah gabah dan beras,” ungkap Hafizah.

Dari perbankan lainnya, kami juga melihat ada potensi untuk dilakukan penjaminan. Namun, komoditi yang dijaminan tidak termasuk dalam skema SRG yang dilandaskan pada UU No. 9 Tahun 2011. “Seperti komoditi gula dan tembakau. Penawaran itu malah datangnya dari pihak bank yang mengusulkan kepada kami,” tambah Hafizah.

“Bisnis inilah kedepannya yang akan kami genjot. Karena dari berbagai analisis ekonom, di tahun 2018 mendatang pergerakan harga komoditi cukup fluktuatif, namun permintaannya cukup besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang meningkat,” pungkas Hafizah Ishak. 📌



Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi

Sikat 'Investasi Bodong'

Redaksi; Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, belum lama ini menerima Buletin Bappebti di ruang kerjanya untuk bertatap muka dan berbincang-bincang seputar 'investasi bodong' yang masih terus menghantui masyarakat. Meski telah menelan banyak korban kerugian di pihak masyarakat, praktik 'investasi bodong' serasa tak dapat dihentikan. Padahal berbagai program preventif telah dilakukan dan tindakan tegas penutupan perusahaan yang tak berizin resmi atau pun penyalahgunaan izin yang dimiliki. Berikut ini intisari perbincangan Buletin Bappebti dengan Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing;

Tanya [T]; Satgas Waspada Investasi tampaknya tak henti-henti menindak praktik 'investasi bodong', sejatinya adakah program atau strategi untuk menghentikan praktik tersebut?

Jawab [J]; Satgas Waspada Investasi tentu punya program dan strategi pencegahan agar praktik 'investasi bodong' tak lagi menelan korban. Namun sebelum sampai pada menjelaskan program pencegahan itu, perlu juga saya sampaikan bahwa sebaik dan sebagus apa pun programnya tetap kuncinya pada masyarakat.

Mengapa begitu? Karena faktanya tidak semua korban 'investasi bodong' berasal dari masyarakat kalangan bawah atau tingkat *literacy* keuangan yang rendah. Misalnya,

dari satu entitas 'investasi bodong' yang ditutup pada tahun 2016, lalu, yang disinyalir menelan kerugian lebih dari Rp 1 triliun, diketahui korbannya banyak dari kalangan berpendidikan tinggi dengan tingkat penghasilan yang cukup. Itu artinya, mereka tergolong latah. Hal ini akibat mendapat informasi sesaat dengan janji tingkat keuntungan besar, atau ikut-ikutan baik dari teman sejawat maupun tokoh masyarakat.

Nah, kembali ke program pencegahan 'investasi bodong', Satgas Waspada Investasi telah mencoba berbagai program dan strategi. Di antaranya, membentuk 39 Satgas Waspada Investasi di berbagai daerah. Melakukan sosialisasi diberbagai tingkatan masyarakat baik melalui Satgas Waspada Investasi maupun instansi atau kementerian yang menjadi anggota Satgas.

[T]: Di tahun 2017, ini, ada berapa banyak entitas yang disinyalir menawarkan 'investasi bodong'?

[J]; Dari periode bulan Januari - Oktober 2017 telah ada sebanyak 62 entitas yang diduga salah ketentuan yang ada. Dan 62 entitas itu, Satgas menemukan ada sebanyak 14 entitas yang menawarkan 'investasi bodong'. 14 entitas itu masing-masing 1. PT Dunia Coin Digital; 2. PT Indo Snapdeal; 3. Questa World/ Questa World Indonesia; 4. PT Investindo Amazon; 5. Dinar Dirham Indonesia/ www.dinardirham.com; 6. Wujudkan Impian Bersama [WIB]/ PT Global Mitra Group; 7. Ahmad Zulkhairi Associates LLP [AZA]/ www.azafund.com; 8. PT Mahakarya Sejahtera Indonesia/ PT Multi Sukses Internasional; 9. PT Azra Fakhri Servistama/ Azrarent.com; 10. Tractoventure/ Tracto Venture Network Indonesia; 11. PT Purwa Wacana Tertata/ Share Profit System Coin/ SPS Coin.co; 12. Komunitas Arisan Mikro Indonesia/K3 Plus; 13. PT Mandiri Financial/ investasisahammandiri.blogspot.co.id; dan 14. Seven Star International Investment.

[T]: Bagaimana Satgas Waspada Investasi bisa memperoleh dan memutuskan bahwa entitas tersebut disinyalir 'investasi bodong'?



[J]: Tentunya ada banyak strategi dan cara yang dilakukan oleh Satgas untuk memperoleh daftar pihak-pihak yang diindikasikan menawarkan 'investasi bodong'. Namun, informasi dari masyarakat menjadi salah satu yang dominan sebagai sumber diperolehnya keterangan 'investasi bodong'. Tetapi informasi itu tetap diverifikasi oleh Satgas, yakni dengan melakukan investigasi langsung di lapangan dan melalui tahapan kajian.

[T]: Bagaimana mereka menawarkan 'investasi bodong' itu?

[J]: Dari kajian yang dilakukan, ternyata penawaran 'investasi bodong' itu mayoritas ditawarkan dengan memanfaatkan media online atau media sosial. Nah, jika melihat modus penawaran 'investasi bodong' itu yang menggunakan media *online* atau media sosial, maka dapat dikatakan korbannya adalah masyarakat menengah atas. Sebab, dari kelompok masyarakat inilah yang kebanyakan atau pengguna media online atau media sosial. Namun, literasi keuangannya masih sangat rendah atau ikut-ikutan. Oleh sebab itu, kami dari Satgas Waspada Investasi tetap meminta agar masyarakat perlu mewaspadaai penawaran investasi yang masif melalui

media *online* atau pun media sosial, misalnya media *online* yang digunakan untuk menawarkan 'investasi bodong' itu ditutup, dalam seketika mereka dengan mudah untuk mengubah alamat-alamat media *online*-nya.

[T]: Bagaimana cara mudah mengetahui penawaran 'investasi bodong'?


[J]: Kami dari Satgas Waspada Investasi selalu mengingatkan masyarakat agar mencermati 2 L. Apa itu? L yang pertama adalah Legalitas dari pihak atau perusahaan yang menawarkan investasi. Jika legalitasnya meragukan setelah melakukan verifikasi dari lembaga berwenang dan yang memberikan izin, maka sebaiknya masyarakat menghindari penawaran itu. Kalau pun legalitasnya lengkap, masyarakat pun perlu juga pelajari L yang kedua yakni Logis. Jika pengembalian dana investasi di luar kewajaran dari lembaga investasi resmi, maka dapat dipastikan investasi itu penuh risiko atau tidak logis.

[T]: Ke depan langkah apa saja yang akan ditempuh Satgas untuk menekan praktik 'investasi bodong'?

[J]: Satgas Waspada Investasi saat ini telah memiliki peta wilayah di Indonesia

yang rawan penawaran 'investasi bodong' yakni di sekitar wilayah Jabodetabek, Banten, Jabar, Jateng dan Jatim. Oleh karena itu, sosialisasi Waspada Investasi akan terus gencar dilakukan di wilayah tersebut dengan menggandeng berbagai pihak dan kalangan.

Selain itu, di tahun ini keanggotaan Satgas Waspada Investasi bertambah 7 kementerian atau lembaga untuk memperkuat dan jangkauan Satgas dalam memberi perlindungan pada masyarakat. Masing-masing Bank Indonesia; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan- PPATK. Jadi saat ini jumlah keanggotaan Satgas Waspada Investasi menjadi 13 kementerian dan lembaga. Anggota Satgas yang sebelumnya yakni Otoritas Jasa Keuangan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kejaksaan; Kepolisian; dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sebagai contoh, masuknya PPATK dikanggotaan Satgas untuk mempermudah koordinasi penelusuran aliran dana yang diinvestasikan larinya ke mana. 

Ancaman Teror dan Upaya Gratifikasi

Tongam L Tobing, Sarjana Hukum lulusan Universitas Sumatera Utara- USU, 1988, ini, didapuk menjadi Ketua Satgas Waspada Investasi sejak Januari 2016 lalu. Dalam masa jabatannya itu, pria kelahiran 10 Desember 1964, Sidikalang, Sumut, ini, tak jarang mendapat ancaman teror dari oknum yang berada di balik entitas 'investasi bodong'. Bahkan, ada yang berupaya untuk memberikan gratifikasi dengan tujuan agar aktivitasnya tak ditutup oleh Satgas Waspada Investasi.


"Saya tegaskan, itu adalah tindakan konyol. Karena apa? Sudah jelas dana yang diperoleh itu dari aktivitas yang haram, lalu misalnya saya terima, 'kan makin tambah haram. Dosanya berlipat-lipat ganda. Dan

saya tak mau menodai jabatan dan institusi negara yang terhormat ini, apa lagi keluarga besar saya," katanya bersemangat.

Ketegasan dan tindakan cepat memang sangat diperlukan di Satgas ini, tambahnya. "Mungkin karena saya dari suku Batak, yang dinilai tegas oleh pimpinan OJK maka ditunjuk memimpin Satgas ini," katanya berseloroh.

Menurut mantan pegawai Bank Indonesia, ini, pelaku 'investasi bodong' bukanlah dari kalangan masyarakat biasa. "Mereka itu adalah orang-orang berpendidikan tinggi yang memiliki kemampuan analisa, dan tak jarang dibalikinya terdapat tokoh-tokoh penting di negeri ini, untuk memuluskan usaha ilegalnya. Maka saya sangat bersyukur, dengan tambahan keanggotaan Satgas, akan

semakin luas dan memperkuat tindakan baik pencegahan maupun penindakan. Itu artinya, pemerintah sangat serius tentang hal ini. Karena kita tidak mau dianggap oleh bangsa lain sebagai negara yang tidak punya kepastian hukum," ucap alumni S2, University of Melbourne, 2002, ini.

Meski tergolong sibuk dalam berbagai tugas, pria berperawakan tegap ini, masih saja mengejar ilmu. Saat ini, Tongam tengah siap-siap menyelesaikan disertasi S3 jurusan ekonomi bisnis di Universitas Padjajaran, Bandung. "Ini hanya bagian dari aktualisasi diri saja, kok. Di samping menambah ilmu dan wawasan. Dan ke depan apa yang saya peroleh ini bisa disalurkan dan menjadi inspirasi kepada generasi selanjutnya," katanya optimis. 

Kunjungan Kerja Bappebti ke Budapest, Hungaria



Sekretaris Bappebti Kemendag, Nusa Eka didampingi oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Bappebti, Melly Anggraini melakukan kunjungan kerja ke Central Bank of Hungary, Budapest Stock Exchange serta KELER CCP dan KELER CSD Hungaria pada tanggal 23-27 September 2017.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan serta perkembangan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Hungaria. Hasil kunjungan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan PBK di Indonesia. 📌

Peresmian dan Penandatanganan MoU FTLC di Universitas Sriwijaya

Kepala Bappebti Bachrul Chairi menyaksikan penandatanganan MoU Futures Trading Learning Center [FTLC] yang merupakan kerjasama antara PT Bursa Berjangka Jakarta [BBJ], PT Kliring Berjangka Indonesia [KBI], PT Rifan Financindo Berjangka dengan Fakultas Ekonomi Program Magister Manajemen Universitas Sriwijaya Palembang, Jumat [13/10].

Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor Universitas Sriwijaya, Anis Saggaf; Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Taufiq Marwah; Dirut BBJ, Stephanus Paulus Lumintang; Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Wibhiyadi; Chief Business Officer PT Rifan Financindo Berjangka, Teddy Prasetya; serta Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsri. 📌



Literasi SRG Rumput Laut di Kabupaten Takalar



Bappebti bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Literasi Sistem Resi Gudang [SRG] untuk komoditi rumput laut, di Kabupaten Takalar, Kamis [19/10].

Acara ini dibuka oleh Bupati Takalar yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bupati I Bidang Pemerintahan, Basri Srijaya, dan menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutriono Edi, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Widhiyadi dan Ketua Kospermindo, Arman Arfah. Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Bappebti, Nusa Eka yang memberikan pengarahan agar gudang SRG yang telah dibangun di Kabupaten Takalar, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Takalar.

Acara dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke sentra Produksi Budidaya Rumput Laut yang merupakan binaan dari Kospermindo yang berlokasi di Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar. 📷

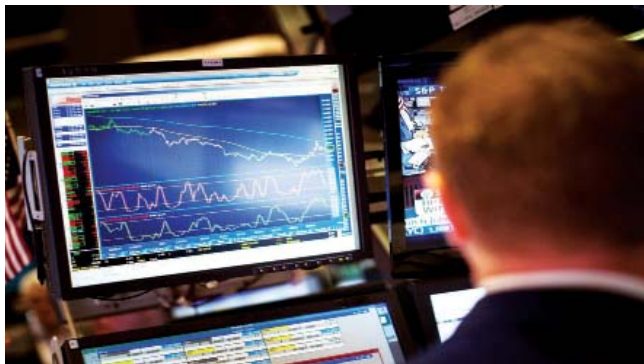
Pelatihan Wartawan Industri PBK

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi menjadi salah satu pembicara pada acara Pelatihan Wartawan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Malang, Jumat [6/10]. Acara ini merupakan kerjasama antara PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia. Tujuannya adalah untuk membina komunikasi dan kerjasama antara PT BBJ, PT KBI dan media, serta pemutakhiran informasi di industri PBK.

Acara ini dihadiri oleh 25 wartawan media cetak dan elektronik nasional dan daerah. Turut hadir di acara tersebut yaitu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Dharmayugo Hermansyah, dan perwakilan dari Bappebti, PT BBJ dan PT KBI. 📷



BC Optimis Transaksi PBK 2018 Naik 10%



Bappebti meyakini pertumbuhan industri perdagangan berjangka cukup cerah pada tahun 2018 mendatang. Hal itu tergambarkan dari pernyataan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi- BC, dalam pertemuan dengan sejumlah jurnalis di Malang, Jatim, beberapa waktu lalu.


"Saya optimis likuiditas transaksi perdagangan pada bursa berjangka bisa naik 10% di tahun 2018," demikian kata Bachrul.

Keyakinan BC itu ditopang rencana dua bursa berjangka Indonesia akan meluncurkan sejumlah kontrak berjangka baru di awal tahun 2018. Seperti sebelumnya

diwartakan, Bursa Berjangka Jakarta- BBJ merencanakan akan meluncurkan kontrak berjangka komoditi gula dan juga kontrak berjangka mata uang rupiah. Sementara itu, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDi juga merencanakan meluncurkan kontrak berjangka komoditi timah, crude oil, valuta asing dan varian emas.

Selain rencana dari dua bursa berjangka tersebut, BC optimis dengan diluncurkannya Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif [SPTT-SPA] akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap industri perdagangan berjangka komoditi.

"SPTT-SPA merupakan sistem pengawasan yang dibangun Bappebti untuk melakukan pengawasan secara *online* terhadap transaksi SPA. Dengan adanya SPTT-SPA, Bappebti dapat melakukan pengawasan transaksi SPA dengan lebih cepat, akurat, dan tepat waktu terhadap pelaku usaha PBK sehingga dapat mencegah terjadinya *market fraud* dan *financial fraud*. Dengan begitu, nantinya transaksi perdagangan berjangka akan semakin meningkat," terang Bachrul.

Ditambahkan Bachrul, di tahun 2018, nanti, ada dua hal yang membuat target transaksi bursa berjangka naik 10%. Pertama pertumbuhan ekonomi, dan kedua yaitu kontrak-kontrak baru yang akan diluncurkan pada tahun depan, katanya. 

BBJ 'Masuk Radar' Pelaku Usaha Asing

Bursa Berjangka Jakarta- BBJ atau dikenal juga Jakarta Futures Exchange- JFX dilirik banyak para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu dikarenakan pasar Indonesia dianggap potensial di masa mendatang. Begitu antara lain dikatakan Direktur Utama BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, dalam sebuah diskusi perdagangan berjangka komoditi bersama jurnalis belum lama ini.


"Belakangan ini dapat kami informasikan bahwa potensi BBJ banyak sekali dilirik pelaku usaha asing maupun domestik. Pelaku usaha asing itu di antaranya berasal dari Uni Emirat Arab, China dan juga ada yang dari Australia. Minat dari pelaku usaha asing itu menunjukkan bahwa PBK di Indonesia memiliki potensi besar di masa mendatang," sambung Paulus.

Oleh sebab itu, tambah Paulus, BBJ saat ini tengah melakukan pembenahan meskipun ada perlambatan dan kelesuan ekonomi baik secara global maupun nasional.

Kami optimis bisa menjadikan BBJ lebih baik, di kalangan negara anggota ASEAN maupun dunia," tegas Paulus.

Sementara itu, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia [Persero], Fajar Wibhiyadi, mengatakan peluang untuk berkembangnya industri PBK masih terbuka dan sangat menjanjikan. "Potensinya sangat besar, tetapi pemahaman atas transaksi ini sangat minim," katanya.

Kondisi yang seperti itu seharusnya masyarakat diberi pemahaman dan edukasi tentang seluk beluk investasi PBK. "Saya lihat, celah inilah yang digunakan oleh oknum 'investasi bodong'. Mereka menjanjikan keuntungan besar tetapi penuh risiko karena tidak mendapat perlindungan dari negara," kata Fajar.

"Jadi saya pikir, semua pihak yang terkait dan juga termasuk jurnalis, harus bisa saling bahu-membahu mengembangkan industri PBK. Kelak industri ini berkembang, Indonesia akan mandiri dan memiliki daya saing kuat untuk bersaing di kancah global," ucap Fajar Wibhiyadi. 

Volume Transaksi Bursa Anjlok, Pialang Ilegal Menohok

Dalam catatan Bappebti pada kuartal III/2017, volume transaksi perdagangan berjangka komoditi baru mencapai 5,06 juta lot, atau turun 3,04% *year on year*- YoY dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 5,2 juta ton.

Berdasarkan rinciannya, transaksi multilateral berkontribusi 18,34% atau sebesar 928.593 lot, sedangkan transaksi bilateral atau yang termasuk sistem perdagangan alternatif- SPA menyumbang 81,66% sejumlah 4,13 juta lot.

Dari sisi pertumbuhan, volume transaksi multilateral pada kuartal III/2017 turun 15,29% yoy dari sebelumnya 1,09 juta lot. Sementara transaksi SPA meningkat 0,22% dibandingkan kuartal III/2016 sejumlah 4,12 juta lot.

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik,

Bappebti, Pantas Lumban Batu, menyampaikan, penurunan pertumbuhan kinerja industri perdagangan berjangka komoditi dari Januari—September 2017 mengalami kendala yang paling besar yaitu berasal dari pialang ilegal yang semakin marak beroperasi di dalam negeri.

“Lambatnya pertumbuhan pada kuartal III/2017 ini disebabkan oleh semakin maraknya perusahaan pialang ilegal yang menawarkan berbagai trik kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” tuturnya.

Dia menambahkan, pialang ilegal telah menyebabkan beralihnya para nasabah ke usaha tersebut yang saat ini jumlahnya semakin meningkat. Akibatnya berimbas pada volume transaksi yang menurun di BBJ dan begitu juga di BKDI. 📌

Industri PBK Menanti Finalisasi PPh Final



Industri bursa berjangka menantikan insentif pajak berupa penerapan PPh final atas transaksi kontrak berjangka komoditi. Kepala Bappebti Bachrul Chairi, dalam keterangannya kepada sejumlah jurnalis dalam sebuah pertemuan, baru-baru ini, mengatakan bahwa pihaknya telah mendatangi Kementerian Keuangan untuk membicarakan pungutan pajak final dari pelaku industri perdagangan berjangka komoditi.

Kendati demikian, lanjutnya, Bappebti dan pelaku industri masih berdiskusi tentang besaran tarif PPh final yang akan dibawa ke meja Dirjen Pajak, Kemenkeu. Salah

satu hambatan berasal dari skema transaksi di pasar berjangka komoditas yang terbagi dua, yakni transaksi multilateral dan transaksi sistem perdagangan alternatif- SPA.

“Mau dibuat PPh final, tetapi SPA harus masuk bursa supaya sama dengan multilateral. Yang jelas diskusinya sudah bergulir,” ucap Bachrul.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah [PP] No. 17 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa, pasal 2, besaran pengenaan PPh adalah 2,5%. Angka ini lebih besar dari tarif pemungutan PPh final di Bursa Efek Indonesia- BEI senilai 0,1%.

Terkait itu, Dirut Bursa Berjangka Jakarta- BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, mengatakan, PPh final yang saat ini dikenakan terhadap investor cukup memberatkan. Oleh karena itu, dengan nilai pajak yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi PBK, khususnya kontrak multilateral.

“PPh yang sekarang memberatkan investor. Kita sendiri sudah mengusulkan nilai PPh final nantinya sebesar 0,1% untuk transaksi multilateral dan bilateral,” ujarnya.

Selain itu, tambah Paulus, perbedaan antara PPh lama dan baru nantinya selain besaran nilai pajak yaitu mengenai kondisi pengenaan. “Nantinya investor akan dikenakan PPh final setelah melakukan likuidasi yang menguntungkan, sedangkan bila mengalami kerugian tidak dibebani pajak,” kata Paulus. 📌

JFX Launches Contract of Refined Sugar Futures in 2018



Jakarta Futures Exchange- JFX will launch a new product next year. The product is a refined sugar futures contract. Director of BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, said this is done to diversify the product so that BBJ remains an attractive place for investors. "Currently, the permit application for refined sugar futures contract is already in the hands of Bappebti," he said.

According to Paul, the scheme of his contract will be the same as other commodities. And now the contract scheme is being considered whether to use the rupiah currency or something else. "As for the trade we are targeting local investors," he said.

Later, this refined sugar futures contract will be an alternative trade of the refined sugar crystal auction market [GKR], which is a physical market organized by Bappebti in 2018.

"Futures contracts are used for industry players to purchase commodities over the long term, and they can hedge or hedge these refined sugars," Paul concluded. 📌

Draft of Presidential Regulation of Commodity Auction Market Has Entered the Final Stage



The draft of Presidential Regulation - Presidential Decree on Commodity Auction Market has entered the finalization phase and is targeted to be completed in the near future. The Presidential Regulation of Commodity Auction Market is a derivative of the issuance of Law no. 7 of 2014, on Trade.

Head of Bappebti, Bachrul Chairi, explained that the discussion of the Presidential Decree has entered the final stage and synchronized with various ministries. "When viewed from its development, in the near future can be published," said Bachrul.

According to Bachrul, there are several aspects of the aspects that are regulated through the beleid. One of them concerns transparency and auction mechanism in accordance with applicable rules. He cited, for example, the arrangement of both on-the-spot and on-the-spot bids. For auction through spot mechanisms, product and safety standards are required.

"Goods auctioned on the spot must have commodities and direct payment," he said.

In the meantime, for auctions that are later submission or forward, a guarantee institution is required to be a clearing company that guarantees payment and delivery of goods. "While the auction market with a forward mechanism, commodities to be auctioned and the perpetrators must obtain permission from the Minister of Trade," he explained.

"From the debate at the synchronization meeting, there is a proposed determination of the type of commodity to be at auction decided by the local government. But if the commodity is regulated by the central government, then its license from the Ministry of Commerce. So in the discussion it is quite dynamic, therefore we are quite optimistic in the near future this law auction market auction will be published," added Bachrul Chairi. 📌

ICDX Target Launches Tin Futures Contract Beginning 2018

Indonesia Commodity and Derivatives Exchange - ICDX plans to launch a tin futures contract early in 2018. "I push in January as it will make Indonesia tin stronger," said ICDX President Director, Lamon Rutten.

According to Lamon, tin futures contract is very important to make a reference price globally. In fact, according to him, without the contract, Indonesia's tin price will not become a reference to global tin price.


Currently, business players can only use the physical market of tin BKDI and it is difficult to predict the price of tin forward. Therefore, they prefer to transact on the London Metal Exchange - LME which provides futures products.

"If this futures contract is properly realized, then Indonesia's tin price can be the world's reference price," Lamon said. "Because Indonesia is the largest tin exporter in the world. "Indonesia is

the second rank for production after China," he added.

He also predicted that, mining companies will be rolling around to build a smelter that became one of the registration requirements in the ICDX exchanges. "If ICDX has a future contract, then the smelter development project becomes more attractive," Lamon explained.

Given the growth in manufacturing and global demand are increasing, Lamon hoped that futures contract could be completed soon because the price in the futures market more current and refers to the future price compared to the spot market.

He added that most people buy with futures price contracts rather than spot prices. "The futures market is moving fast, if I am a tin businessman I want to see the price quickly in order to adjust production and purchase," said Lamon. 



Glossary

1. CLEAR

The process by which a clearing house maintains records of all trades and settles margin flow on a daily mark-to-market basis for its clearing member.

2. CLEARING

The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract.

3. CLEARING CORPORATION

An independent corporation that settles all trades made at the Jakarta Futures Exchange acting as a guarantor for all trades cleared by it, reconciles all clearing member firm accounts each day to ensure that all gains have been credited and all.

4. CLEARING

Margin Financial safeguards to ensure that clearing members (usually companies or corporations) perform on their customers' open futures and options contracts.

5. CLEARING MEMBER

A member of the Clearing House or Association. All trades of a non-clearing member must be registered and eventually settled through a clearing member.

6. CLEARING PRICE

See Settlement Price.

7. CLEARINGHOUSE

An agency or separate corporation of a futures exchange that is responsible for settling trading accounts, clearing trades, collecting and maintaining margin.

8. CLOSE END FUNDS

Managed investment which is listed on the stock exchange. The price of its shares will be determined according to demand and supply.

9. CLOSE OUT

To trade an equal and opposite futures transaction to that already held. See also offset.

10. CLOSE, THE

The period at the end of the trading session officially designated by the exchange during which all transactions are considered made "at the close".

SRG Redam Jerit Petani Lada

Sukardi

Kepala Bagian Pengawasan Sistem Resi Gudang, Bappebti

Keresahan petani lada semakin memuncak. Lada yang menjadi tumpuan hidup, harganya semakin tak bersahabat. Hal itu terjadi di semua sentra produksi lada di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Bangka Belitung- Babel.



Provinsi Babel sejak ratusan tahun lalu sudah tenar di dunia sebagai penghasil utama lada putih yang memiliki cita rasa, aroma dan tingkat kepedasan serta ketahanan yang tinggi. Pada tahun 2016, luas perkebunan lada putihnya mencapai 49.822 hektare dengan produksi sekitar 36.211 ton.

Selain bergantung dari timah - karena Babel juga penghasil timah - banyak masyarakatnya yang juga bergantung hidup dari hasil lada. Jadi tidak mengherankan, ketika harga lada merosot tajam, maka sebagian besar masyarakatnya juga ikut tertekan. Oktober 2017 lalu, harga lada putih di tingkat petani lokal merosot menjadi Rp60-Rp70 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp85 ribu per kg. Dan itu sudah terjadi sejak dua bulan terakhir. Cukup miris. Sebab di tahun-tahun sebelumnya, harga lada putih cukup berkibar di atas Rp100 per kg.

Penurunan harga lada tersebut disebabkan karena kondisi harga pasar lada dunia yang memang sedang turun. Hal tersebut disebabkan karena Vietnam mulai menjual hasil lada petaninya secara besar-besaran sehingga stok lada di pasar dunia meningkat [*over supply*].

Kondisi tersebut tentu saja membuat resah Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan. Karena itu dia berusaha mencari solusinya. Akhirnya dia meyakini untuk menerapkan program SRG sebagai salah satu solusi terhadap kondisi harga lada yang selalu berfluktuasi. Langkah Gubernur ini nampaknya banyak mendapat apresiasi positif dan dukungan dari masyarakatnya.

Dengan cepat dan tanggap, Erzaldi beserta jajarannya bergerak mempersiapkan implementasi SRG untuk komoditas lada. Koordinasi, sosialisasi dan edukasi juga terus digalakkan Pemprov Babel. Dan saat ini, persiapan pelaksanaan SRG tersebut sudah mencapai 75 persen. Dan dalam waktu dekat gudang SRG tersebut akan diluncurkan. Instrumen SRG dilahirkan dengan misi utama untuk meningkatkan kualitas komoditi dan yang terpenting meningkatkan kesejahteraan petani. Sistem ini mendorong petani untuk lebih profesional sehingga dapat menghasilkan komoditi terbaik dan berkualitas ekspor. Komoditi yang disimpan di gudang SRG telah melalui uji mutu yang dilakukan oleh lembaga yang disebut lembaga penilai kesesuaian.

Ada beberapa manfaat SRG bagi petani. *Pertama*, untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik dengan melakukan sistem

tunda jual. Maksudnya, petani dapat menyimpan komoditinya di gudang SRG terlebih dahulu saat panen raya yang umumnya harga rendah karena stok berlimpah. Lalu, petani dapat menjualnya kembali ketika harga tinggi.

Kedua, mendapatkan pinjaman dari bank untuk pembiayaan modal kerja pada musim tanam berikutnya dengan jaminan resi gudang tanpa agunan lainnya. *Ketiga*, mendapatkan kepastian mutu dan jumlah karena tes uji mutu dilakukan oleh LPK yang telah terakreditasi.


Keempat, mempermudah jual beli komoditi secara langsung maupun melalui pasar lelang online. Sebab, petani tidak perlu lagi membawa komoditinya sebagai contoh tapi cukup membawa resi. Dan terakhir, mendorong petani untuk berusaha berkelompok sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan posisi tawar petani.

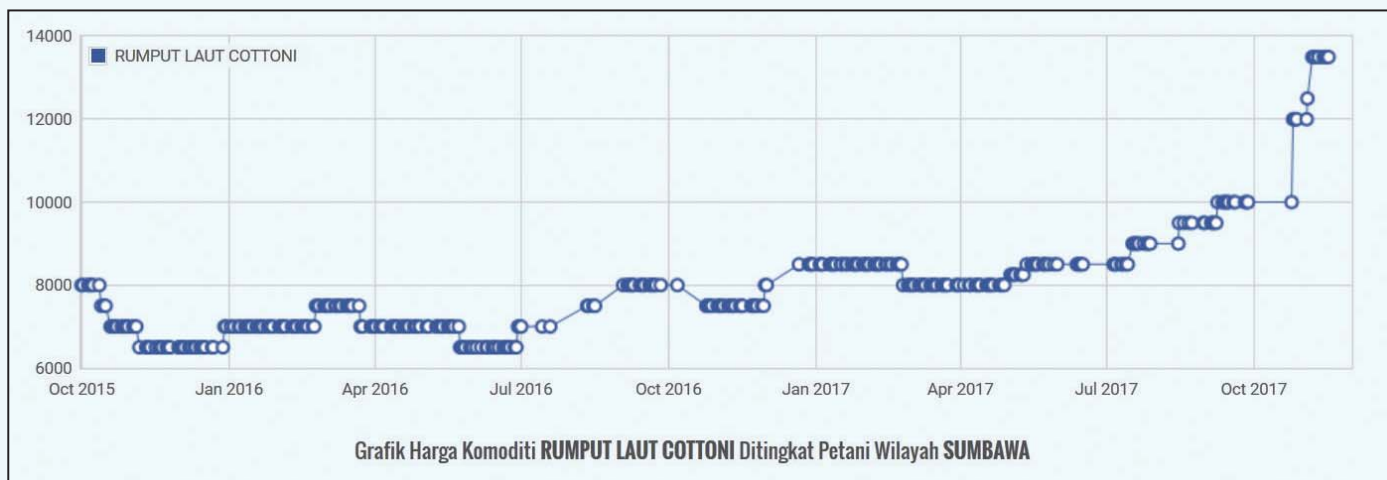
Pasar Lada Dunia

Salah satu program unggulan Provinsi Babel yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah- RPJMD 2017-2022, yaitu pengembangan pembangunan agropolitan. Dalam implementasinya, Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan ingin menjadikan Babel sebagai pasar lada di dunia.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Babel telah melakukan sejumlah langkah, satu diantaranya akan menempatkan satu lokasi sebagai wadah promosi lada Babel di London, Inggris. Untuk melakukan itu, Erzaldi melakukan kerjasama dengan PT Timah yang memiliki kantor pemasaran di sana. Dia sudah minta kepada PT Timah agar Pemprov diberikan tempat di kantor tersebut untuk promosi dan pemasaran lada Babel.

Dia berharap dengan langkah itu akan semakin membuka peluang membangkitkan kembali kejayaan lada Babel yang di kenal dengan Muntok White Pepper.

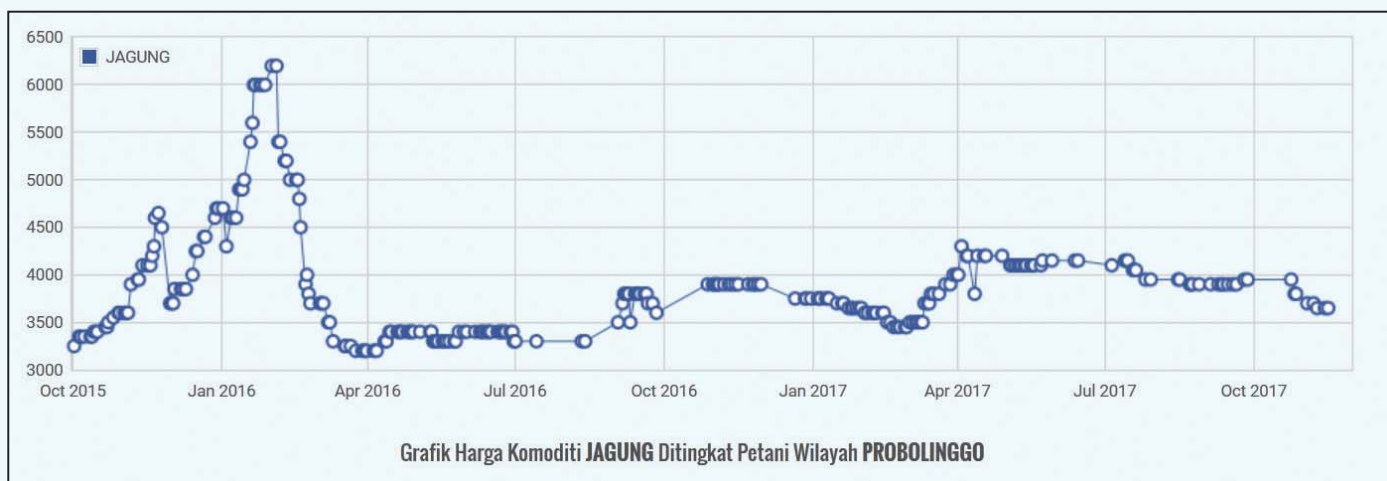
Di samping itu, program pengembangan agropolitan juga akan didukung oleh SRG. Jika SRG sudah dijalankan, maka para petani harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh SRG. Mulai dari penanaman, pembibitan hingga proses pencucian harus sesuai aturan agar lada yang dihasilkan berkualitas. 



<http://infoharga.bappebti.go.id/>



Harga rumput laut sepanjang Oktober 2017 perlahan merangkak naik. Untuk wilayah Sumbawa, harga rumput laut di tingkat petani berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut disinyalir karena menurunnya produksi rumput laut. Penurunan produksi disebabkan karena dua faktor. Pertama, terjadinya gagal panen yang disebabkan oleh anomali cuaca - hujan membuat gagal panen di sejumlah daerah. Kedua, tren harga rumput laut yang sebelumnya turun menyebabkan petani rumput laut tidak bertani.



<http://infoharga.bappebti.go.id/>



Harga jagung secara nasional sepanjang Oktober 2017 kurang bergairah. Harga di sejumlah daerah relatif tertekan dan mengalami tren penurunan. Meski begitu, harga jagung di Probolinggo sempat stagnan dengan bertahan di posisi Rp3.950. Harga selanjutnya semakin tertekan di posisi Rp3.800. Tren menurunnya harga tersebut salah satunya dipengaruhi faktor global. Diantaranya, proyeksi melimpahnya panen jagung di Amerika Serikat menjadi sentimen negatif yang menekan harga jagung. Selain itu, permintaan jagung AS di pasar global cenderung melemah pada tahun ini.



Informasi harga komoditi juga dapat dengan mudah diperoleh dengan mengirim SMS ke SMS Center Info Harga Bappebti.



SMS request informasi harga ditulis dengan format: HARGA#[NAMA_KOMODITI]#[NAMA_DAERAH] dan dikirim ke nomor 0812 1867 8000
Contoh : HARGA#BERAS#INDRAMAYU



Mengelola Risiko Harga Melalui Lindung Nilai

*] Pantas Lumban Batu

Pengelolaan risiko fluktuasi harga kerap dilakukan oleh kelompok hedger untuk melindungi bisnisnya. Kelompok ini umumnya berasal dari pelaku usaha produsen, pedagang, eksportir dan prosesor serta industri pemakai.

Risiko fluktuasi harga akan senantiasa ada pada pemilikan dan penanganan komoditi, seperti pertanian, pertambangan, industri dan komoditi lainnya. Secara alamiah, aktivitas petani ataupun pengusaha akan dihadapkan pada pergerakan harga yang tidak terduga-duga. Sebagai contoh, perusahaan pengolah bahan baku selama beberapa hari atau minggu bahkan beberapa bulan akan menghadapi risiko harga bahan yang disimpannya- *inventory price risk*. Perantara yang membeli komoditi untuk dijual pada waktu yang akan datang, juga menghadapi risiko harga yang terjadi di antara waktu pada saat membeli dan pada saat harus menjual kembali.

Demikian juga petani atau produsen, menanam pada musim tanam dengan pengetahuan yang tidak pasti tentang harga di saat panen. Hal itu pada dasarnya petani atau produsen berspekulasi tentang harga di pasar fisik- *spot* dan ini berarti suatu risiko.

Pada dasarnya, petani atau perusahaan pengolah dapat memperoleh keuntungan dengan jalan berspekulasi atas harga di pasar fisik dan juga dengan pelaksanaan fungsi pemasaran seperti biasanya. Tetapi, berspekulasi atas harga di pasar fisik yang mengandung risiko harga akan turun dan bukannya naik. Karena harga komoditi khususnya hasil pertanian dan produk primer lainnya, relatif fluktuatif- *highly volatile* maka banyak pengusaha yang tidak memiliki kemampuan dana banyak untuk berspekulasi pada harga fisik.

Mereka lebih memilih untuk memperoleh keuntungan melalui peran mereka dalam melaksanakan fungsi pemasaran seperti biasanya. Untuk pengusaha seperti inilah bursa berjangka memberikan fasilitas dan kesempatan untuk memperkecil risiko.

Lindung nilai atau yang disebut *hedging*, merupakan suatu mekanisme proteksi terhadap risiko harga. Dan aktivitas lindung nilai merupakan alat manajemen risiko.

Dalam praktik lindung nilai, terkandung substitusi pada transaksi komoditi di pasar fisik dengan transaksi pasar berjangka. Mekanisme lindung nilai terdiri dari transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dengan posisi di pasar berjangka, bertujuan untuk melindungi perusahaan dari pengaruh pergerakan harga di pasar fisik yang tidak sesuai dengan diperkirakan sebelumnya.

Setiap kegiatan perdagangan diharapkan adanya perolehan keuntungan, akan tetapi juga bisa dihadapkan dengan risiko kerugian yang selalu melekat dalam kegiatan tersebut. Risiko umumnya berasal dari akibat perubahan harga komoditi, perubahan kurs mata uang, suku bunga, inflasi dan lain sebagainya. Untuk melindungi pengusaha dari risiko tersebut, dapat dilakukan melalui lindung nilai di bursa berjangka. Dengan melakukan lindung nilai, risiko tersebut dapat dialihkan- *transfer risk* kepada investor yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga di bursa berjangka.

Jenis Hedging

Ada dua jenis lindung nilai, yaitu lindung nilai jual- *selling hedge* untuk mengatasi risiko turunnya harga. Dan, lindung nilai beli- *buying hedge* untuk mengatasi risiko karena kenaikan harga.

Lindung nilai merupakan kegiatan pengambilan posisi di pasar berjangka yang berlawanan dengan pasar fisik. Melalui pengambilan posisi yang berlawanan antara pasar berjangka dengan pasar fisik, maka kerugian yang timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar fisik dapat dikurangi dengan keuntungan yang diperoleh di pasar berjangka atau sebaliknya.

Lindung nilai bukan kegiatan yang bersifat spekulasi, karena untuk melakukannya dibutuhkan pengetahuan yang memadai dan perhitungan cermat. Dengan demikian, sebelum melakukan lindung nilai perlu menentukan strategi yang tepat guna mencegah terjadinya kerugian. Pada dasarnya manfaat lindung nilai adalah merupakan sarana untuk mengurangi atau meminimalkan risiko akibat perubahan harga dan memberikan kepastian berusaha. Karena, membantu pengendalian produk dan persediaan bahan baku guna memenuhi kebutuhan produsen, pengolah atau pabrik.

Di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, para eksportir menghadapi persaingan di bidang ekspor



yang semakin ketat, dan terkadang menyulitkan usaha dalam perebutan pasar. Maka, kemampuan dan keberanian eksportir harus didukung untuk menjangkau kontrak ekspor dengan waktu pengapalan yang lebih jauh ke depan.

Seperti diketahui, saat ini sudah cukup banyak eksportir yang menguasai kemampuan teknologi informasi dan secara cermat mengikuti perkembangan harga di pasar internasional serta mengembangkan hubungan tetap dengan berbagai importir di luar negeri. Oleh karena lancarnya hubungan komunikasi, sering terjadi permintaan langsung dari importir di luar negeri yang harus dapat dijawab dan diputuskan segera. Di antara permintaan tersebut, ada yang minta pengapalan dilakukan beberapa waktu kemudian.

Menutup kontrak ekspor dengan waktu pengapalan jauh ke depan, membawa kemungkinan timbulnya risiko rugi bagi eksportir bila kemudian terjadi fluktuasi harga yang tidak sesuai dengan perkiraannya. Di samping itu, belum tentu pada waktu permintaan diterima untuk pengapalan beberapa waktu kemudian eksportir sudah memiliki atau menguasai barang yang diperlukannya. Sebaliknya, harga yang berlaku dengan masa pengapalan beberapa waktu kemudian, umumnya adalah lebih tinggi sebagai akibat biaya penyimpanan di gudang yang diperhitungkan oleh penjual selama barang belum dikapalkan. Kontrak ekspor semacam ini memberikan manfaat tambahan bagi negara pengekspor berupa jasa pergudangan.


Menghadapi masalah meningkatnya kemampuan dan keberanian untuk menjangkau transaksi ekspor, dengan masa waktu pengapalan yang lebih jauh ke depan, serta masalah risiko rugi sebagai akibat fluktuasi harga, dapat dilindungi dengan sarana perdagangan berjangka komoditi.

Facilitas yang tersedia di bursa berjangka, juga dapat digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko kerugian sebagai akibat tertimbunnya suatu partai barang di gudang eksportir tanpa adanya pembeli. Seperti diketahui, banyak eksportir produsen mempunyai alat prosesing sendiri yang

terikat dengan penggunaan jumlah tenaga kerja tertentu. Dan karena itu, harus selalu berusaha agar unit prosesingnya dapat bekerja dengan kapasitas penuh. Bagi perusahaan semacam ini adalah wajar, bahwa pada waktu-waktu tertentu terjadi penimbunan stok barang di gudang karena bagian pemasaran belum dapat memasarkannya ke luar negeri.

Untuk dapat memanfaatkan sarana bursa berjangka secara lebih mantap dan maksimal, maka perusahaan perlu menunjuk bagian pemasaran yang sehari-harinya secara cermat dan terus menerus mengikuti perkembangan harga dari berbagai komoditi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga perencanaan terhadap besarnya bagian yang dirasa perlu di- *hedge* dan waktu pelaksanaannya betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mungkin tidak semua stok yang dimiliki perlu dilindungi melalui bursa berjangka, tapi cukup untuk suatu jumlah marginal perimbangan antara '*supply* dan *demand*'. Kadangkala ada juga transaksi *hedge* yang dengan sengaja dibiarkan pemiliknya sampai jatuh tempo. Dan, menganggap lebih baik baginya untuk melaksanakan penyerahan barang secara fisik karena ruangan gudang penyimpanan barang sudah diperlukannya sementara pembeli untuk stok lama belum ada.

Pemegang kontrak beli dengan penyerahan kemudian juga mungkin pada akhir kontraknya memilih untuk menerima penyerahan barang, karena diperlukannya untuk memenuhi kontrak ekspornya. Kemungkinan selalu terbuka bagi pemegang kontrak yang dibeli atau dijual di bursa berjangka untuk membiarkan kontraknya jatuh tempo dan bersedia menerima atau melakukan penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi yang diperjualbelikan di bursa berjangka adalah kontrak komoditi yang mempunyai standar mutu, tempat pelabuhan, bulan penyerahan dan lain sebagainya, dibuat dalam spesifikasi kontrak. 

***] disarikan dari Buku Penulis; Pasar Derivatif**

Noer Juwantiningsih, Kepala Kancab Surabaya PT Kresna Investa Futures

Tekun dan Percaya Diri

Mendapat kepercayaan perusahaan memimpin sebuah kantor cabang bukanlah perkara mudah tapi juga penuh tanggungjawab. Namun, bagi Noer Juwantiningsih kepercayaan itu dijawab dengan kinerja dan jaga reputasi perusahaan.

Kompetisi di bidang investasi perdagangan berjangka komoditi di Kota Surabaya, Jatim, dapat diibaratkan 'bagai mencari jarum di tumpukan tepung'. Rasanya akan sulit untuk mendapatkan investor di tengah masyarakat yang sudah apatis karena maraknya praktik 'investasi bodong' dan lagi rendahnya tingkat pengetahuan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Tetapi stigma itu mampu ditepis Noer Juwantiningsih, dengan menunjukkan kinerja positif.

Buktinya, Noer, begitu dia disapa, telah memimpin Kantor Cabang Surabaya PT Kresna Investa Futures- KIF dalam kurun waktu tiga tahun lebih.

Bahkan, godaan untuk bermain culas pun dia singkirkan dari pikiran. Karena prinsipnya, sekali tercebur pada godaan itu maka rusaklah reputasi perusahaan dan akan sulit untuk mengembalikannya. "Di mana pun, kalau kita mau menerima godaan dan bermain culas, kesempatan itu selalu ada. Apa lagi masyarakat di daerah itu hanya sedikit yang dapat mengolah informasi dan tingkat pengetahuan di bidang investasi pun masih terbatas," kata Noer, ketika menerima Buletin Bappebti berbincang-bincang di ruang



kerjanya di Menara Standart Chartered Bank, Jln. Basuki Rachmad No. 63-65, Surabaya.

Menurut saya, "lebih baik tidak mencapai target, dari pada harus mengorbankan reputasi perusahaan."

Noer Juwantiningsih diberi kepercayaan memimpin Kancab. KIF Surabaya, terhitung sejak Juli 2014. Atau sekitar satu tahun pasca KIF membuka kantor cabang di kota pahlawan itu.

"Saya cukup yakin 'kok, di mana pun ada potensi masyarakat untuk memasuki investasi perdagangan berjangka komoditi. Tinggal kita mau telaten atau tidak untuk menemukannya. Karena itu,

di sini kami tak putus-putus melakukan edukasi dan sosialisasi. Itu lah prioritas kami," terang Noer.

Dengan adanya pemahaman itu, tambah Noer, maka akan lebih mudah untuk menawarkan kontrak berjangka komoditi. Karena pada dasarnya, ketika masyarakat memiliki dana lebih, akan mencari bentuk-bentuk investasi yang likuid. "Kalau jual-beli tanah atau properti 'kan tidak mudah. Pasti butuh waktu dan terkadang melelahkan. Tapi kalau investasi di bursa berjangka, setiap saat bisa ke luar masuk pasar," ujar wanita kelahiran 29 Juli, di Cirebon, Jabar, ini.

Trader for Living

Karena itu, dalam setiap kesempatan memberi edukasi kepada calon investor, wanita berperawakan mungil, ini, selalu menekankan agar dapat menikmati perannya sebagai *trader*. Jika mereka bisa rileks dengan portofolio investasinya, maka akan mudah mengambil keputusan tepat untuk ambil posisi jual atau beli. “Tapi kalau dibenaknya sudah ada rasa was-was bahwa investasinya akan merugi, maka besar kemungkinan sulit mengambil posisi,” terangnya.

Saya pernah baca sebuah buku, di sana disebut ‘*trader for living*’. Dan setelah saya pahami, maknanya cukup dalam jika kita berkecimpung di bidang investasi. Itu artinya, kita harus bisa melawan ego, tak latah atau *kemaruk*-kata orang Jawa. Misalnya Ketika harga bagus, maka langsung ambil posisi jual untuk ambil untung, dan beli lagi dalam jumlah besar. Akhirnya apa? Ketika harga naik, pasti ada kecenderungan untuk kembali ke posisi semula, dan bahkan bisa lebih rendah lagi. Sehingga yang terjadi adalah merugi, jabar Noer.

Di samping bisa mengendalikan ego, ucap alumni Fak. Biologi, Univ. Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jateng, 1994, ini, adalah mampu menambah pengetahuan dan wawasan melalui berbagai informasi pasar. Dengan begitu kita bisa membaca arah pasar dan mengambil keputusan tepat.

“Saya juga terkadang heran, kenapa saya bisa bertahan di industri ini. Dan setelah saya amati, ternyata ada hubungannya dengan bidang studi yang pernah digeluti di Fakultas Biologi. Di bidang studi itu, seorang mahasiswa dituntut untuk bisa menganalisa berbagai data dengan instrumen seperti mikroskop atau pun alat-alat yang terdapat di laboratorium,” papar Noer.

“Investasi di bidang perdagangan berjangka ini juga sama, kita harus bisa menganalisa dengan berbagai instrumen yang ada. Misalnya, mampu analisa fundamental ataupun analisa



teknikal. Tetapi itu pun terkadang kurang, kita juga harus bisa dapatkan intuisi atau *feeling*,” ujar penggemar olah raga pendaki gunung ini.

3 x Serah Fisik

Menurut pengakuan anak pertama dari tiga bersaudara buah pernikahan D. Kusdwilandrijo dengan ibundanya, Sulesih, ini, investor KIF Surabaya masih didominasi perdagangan bilateral. Itu dikarenakan kontrak berjangka bilateral cenderung likuid dibandingkan kontrak berjangka multilateral produk bursa. Meski demikian, KIF Surabaya di tahun 2016, lalu, tercatat sebagai salah satu perusahaan pialang anggota Bursa Berjangka Jakarta- BBJ yang pernah melakukan serah fisik komoditi emas sebanyak tiga kali.

“Investor yang memperoleh fisik emas itu benar-benar melakukan transaksi dan menginginkan serah fisik emas untuk tujuan memperoleh fisiknya sebagai tabungan. Dan kami cukup senang dengan prestasi itu, karena mampu mengedukasi masyarakat untuk transaksi perdagangan berjangka multilateral,” ujar Noer, bangga.

Noer Juwantiningsih boleh dibilang sudah cukup merasakan manis-pahitnya

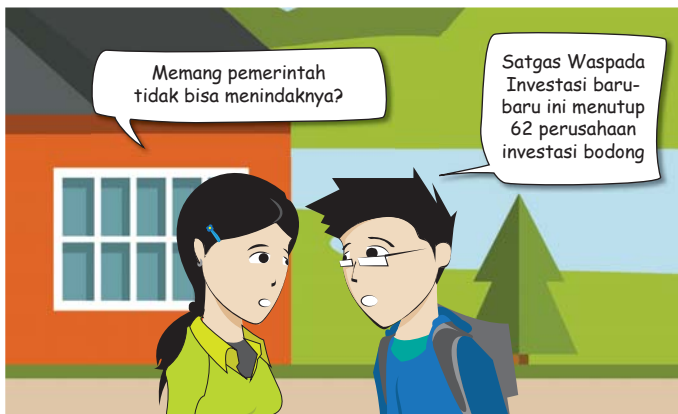
industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Memulai karier dari bawah dengan mencari nasabah hingga mendapatkan izin Wakil Pialang Berjangka di tahun 2001. Tak sampai di situ, dia juga beberapa kali pindah perusahaan pialang berjangka hingga akhirnya berlabuh di KIF tahun 2012.

“Dengan posisi sekarang sebagai Kepala Kancab KIF Surabaya, saya sudah cukup menikmati buah perjuangan selama ini. Kalau soal harta atau penghasilan, itu ‘kan relatif, ya? Berapa pun besarnya pasti akan kurang. Tetapi ketika kita bisa mengelola apa yang diperoleh dari perusahaan, pasti jadi berkat,” kata Noer, optimis.

Untuk mengembangkan pasar KIF di Surabaya, melalui peningkatan pengetahuan di bidang perdagangan berjangka komoditi, Noer bersama tim-nya tengah menjajaki mendirikan *Futures Trading Learning Center- FTLC* di empat perguruan tinggi.

“Semoga di tahun depan- 2018 program ini bisa direalisasikan. Karena selain jangkauannya lebih luas untuk memberi edukasi, image perusahaan juga akan makin lebih baik,” pungkas Noer Juwantiningsih, dengan Buletin Bappebti. 📌

Investasi Bodong Makin Songong



0811-1109-901
SMS CENTER
BAPPEBTI

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901.
 Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN
 *SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Jhonny Pratama, Tangerang, 085959xxxxx

Tanya :

Min, mohon penjelasan, apakah ada kaitannya antara pasar lelang komoditi dengan bursa berjangka?

Jawaban:

Sebelumnya terimakasih kami sampaikan atas pertanyaan yang bagus ini. Untuk diketahui, hubungan pasar lelang komoditi atau lazim disebut *spot market* dengan bursa berjangka- *futures market* sangatlah terkait. Dalam praktiknya di negara yang bursanya sudah maju, harga di pasar *spot* akan mempengaruhi harga *futures*. Oleh karena itu, pelaku pasar *spot* akan melakukan lindung nilai di *futures market*.

Terima kasih.



KIAT-KIAT BERTRANSAKSI

Perdagangan Berjangka Komoditi

Minimalkan
Risiko Anda
Dalam **Bertransaksi**
Perdagangan
Berjangka
Komoditi

Cara Aman
Bertransaksi Perdagangan
Berjangka Komoditi

Sebelum melakukan kegiatan di bidang PBK, Investor perlu memahami tata cara bertransaksi dalam kegiatan PBK serta subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan, menguasai teknis-teknik analisis PBK dan investor memahami informasi perkembangan harga.

Jadilah Investor
yang **Cerdas**

Investor yang ingin menginvestasikan uangnya dalam Perdagangan Berjangka, sekurang-kurangnya harus mengerti atau memahami dasar-dasar analisis pasar yang dipergunakan untuk memperkirakan pergerakan harga di Bursa Berjangka.

Sebelum melakukan investasi di bursa berjangka, sebagai calon investor yang belum mengerti benar investasi kontrak berjangka agar mempertimbangkan sepuluh langkah berikut:

- 01** Pertama. Siapa saja yang berminat untuk berinvestasi dalam kontrak berjangka, hendaknya memiliki dana lebih yang bukan uang pinjaman dan bukan uang yang masih berupa transaksi margin.
- 02** Kedua. Calon investor perlu memikirkan persiapan uang jaminan (margin) karena dalam melakukan transaksi kontrak berjangka, pihak yang melakukan penjualan maupun pembelian harus memberikan uang jaminan. Oleh karena kontrak berjangka memperdagangkan risiko, risiko itu harus ada jaminannya.
- 03** Ketiga. Calon investor perlu memahami secara nyata produk yang ditransaksikan di bursa dan faktor sifat dan karakteristiknya mengingat masing-masing jenis memiliki ciri yang berbeda.
- 04** Keempat. Investor harus menyediakan investasi dengan dana yang terencana dan siap menghadapi risiko terburuk, yaitu kerugian.
- 05** Kelima. Dana cadangan perlu disiapkan pula untuk membeli kontrak berjangka komoditi lain yang pasarnya terlihat sangat aktif. Oleh karena itu, portofolio investasi dilakukan secara menyebar untuk menekan risiko seminimal mungkin.
- 06** Keenam. Dalam hal tidak ada transaksi short dalam kontrak berjangka, jangan melakukan investasi atau transaksi coba-coba.
- 07** Ketujuh. Calon investor (nasabah) dianjurkan memilih pialang yang memiliki kinerja yang baik dan memberikan layanan terbaik dari berbagai segi, terutama penetapan jumlah dana yang diperbolehkan untuk diinvestasikan dan fee yang harus dibayar karena di sana tidak ada patokan tetap dan semuanya tergantung pada pialang.
- 08** Kedelapan. Agar calon investor mempersiapkan data historis pergerakan harga kontrak berjangka komoditi atau produk yang diperdagangkan di pasar internasional atau lokal selama paling tidak tiga bulan ke belakang untuk bahan analisis dan melihat kecenderungan pergerakan pasar. Dengan demikian, frekuensi kenaikan harga untuk investasi dapat ditentukan besarnya.
- 09** Kesembilan. Calon investor hendaknya mempertimbangkan ekonomi makro, keadaan perdagangan luar negeri, serta kebijakan yang terkait dalam kontrak berjangka maupun produknya. Selain itu, keadaan alam (cuaca) perlu diperhatikan pula untuk kontrak berjangka komoditi. Harga-harga komoditi internasional pun harus dipelajari karena penetapan harga komoditi lokal tidak berbeda jauh dengan harga komoditi internasional yang sejenis.
- 10** Kesepuluh. Calon investor harus memperhatikan batas akhir kontrak karena saat kontrak habis, investor siap menerima barang yang jumlah dan volumenya bergantung pada nilai investasi. Hal itu akan menambah biaya berupa ongkos pengiriman, penyimpanan, dan ongkos asuransi.

Jika kesepuluh langkah ini diterapkan, risiko yang mungkin timbul dalam berinvestasi di bursa berjangka diharapkan dapat dihindari, namun demikian, calon investor harus tetap berhati-hati dan waspada.

Customer Due Diligence Uji Tuntas Nasabah

Tindakan Pialang Berjangka



Identifikasi



Verifikasi



Pemantauan

(Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016)

www.bappebti.go.id